



Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan APBD Kota Jambi

Alya Hanifah^{1*}, Ratih Kusumastuti²

^{1,2}Progdi Magister Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian. Muaro Jambi, Jambi, Indonesia

Korespondensi penulis: alyahanifah0499@gmail.com

Diterima: Maret 2024; Direvisi: April 2024; Dipublikasikan: Mei 2024

ABSTRACT

This research is motivated by the need to understand and analyze the government's internal control system in managing Regional Budget funds (APBD) in Jambi City. The main focus of the research is to explain the implementation of the internal control system by the Jambi City Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) in the context of APBD management. This research uses descriptive qualitative methods, with the primary objective of describing and describing existing phenomena. Through observation, interviews, documentation, and checking the validity of the findings, this research aims first to understand the government's internal control system applied in managing APBD funds in Jambi City. Second, this study aims to analyze the effectiveness of the internal control system implemented by BPKAD Jambi City in managing APBD funds. The results showed that BPKAD Jambi City had successfully implemented the Government's Internal Control System (SPIP) according to the Ministry of Home Affairs guidelines.

Keywords: Internal Control System, APBD, BPKAD, Jambi City

ABSTRAK

Pemahaman dan analisis mekanisme pengendalian internal pemerintah dalam penanganan uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Jambi menjadi pendorong penelitian ini. Menjelaskan bagaimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi menerapkan sistem pengendalian intern dalam kerangka pengelolaan APBD menjadi tujuan utama penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengilustrasikan peristiwa terkini melalui penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan observasi, wawancara, dokumentasi, dan pengecekan keabsahan temuan, penelitian ini bertujuan pertama, mekanisme pengendalian intern pemerintah yang digunakan dalam pengelolaan dana APBD di Kota Jambi secara rinci. Kedua, untuk mengevaluasi seberapa baik sistem pengendalian intern BPKAD Kota Jambi dalam mengelola dana APBD. Berdasarkan temuan penelitian, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah efektif diterapkan oleh BPKAD Kota Jambi sesuai dengan norma Kementerian Dalam Negeri.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, APBD, BPKAD, Kota Jambi

PENDAHULUAN

Tujuan dibentuknya pemerintah Indonesia menurut pembukaan UUD 1945 adalah untuk menjaga negara dan keturunannya sekaligus meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, mengembangkan pengetahuan masyarakat, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia. Dalam upaya mencapai cita-cita nasional ini, pemerintah telah melakukan berbagai langkah, salah satunya melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara konseptual, desa diartikan sebagai entitas otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan badan hukumnya sendiri yang bersifat mandiri.

Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 (Undang-Undang RI, 2004), menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan tata kelola good dan clean governance, khususnya dalam hal peningkatan kualitas pengendalian intern. Presiden dapat mengawasi dan mengendalikan Sistem Pengendalian Intern secara keseluruhan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang untuk menjamin pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan bertanggung jawab. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang diterbitkan untuk menyikapi ketentuan Pasal 58 Undang-Undang tersebut (Peraturan Pemerintah, 2008).

Penekanan harus diberikan pada betapa pentingnya kualifikasi dan keterampilan pegawai pemerintah daerah termasuk pendidikan dan pelatihan, dimana mereka diikutsertakan dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut (Bulan et al., 2017), proporsi pekerja yang tidak memiliki pelatihan akuntansi formal menunjukkan kurangnya pemahaman dan kemahiran staf Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani uang. Pemahaman akuntansi yang menyeluruh dan luas dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan organisasi dan mencegah penipuan informasi (Miliani et al., 2022). Pemahaman akuntansi yang terbatas berdampak besar pada kualitas pelaporan keuangan, menurut penelitian (N. L. W. T. Lestari & Dewi, 2020).

Salah satu komponen fundamental bagi keberhasilan organisasi adalah pengendalian internal. Pengendalian internal sangat penting untuk keberhasilan setiap organisasi karena pengendalian internal yang kuat juga akan menghasilkan kinerja organisasi yang kuat, atau dalam kata lain, peningkatan kinerja anggota organisasi bergantung pada pengendalian internal yang kuat untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kondisi globalisasi serta kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi menjadi semakin penting. Semua orang yang tetap berusaha untuk masa depan yang lebih cerah akan terpengaruh oleh kemajuan teknologi dan pembangunan ini. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan dalam menjalankan proses bisnis saat ini pada bisnis skala menengah hingga besar dengan jumlah data yang banyak merupakan salah satu kemudahan yang diharapkan.

Sejak adanya reformasi di Indonesia pada tahun 1998, terjadi berbagai perubahan yang tidak hanya mencakup pemerintah pusat tetapi juga mencakup wilayah-wilayah daerah. Reformasi dimulai dengan perubahan sistem pemerintahan yang sebelumnya terpusat, dan hal ini tercermin dalam diberlakukannya peraturan-peraturan yang mengatur pemerintahan lokal. Perubahan ini memberikan tingkat otonomi yang lebih tinggi bagi pemerintah daerah, yang mengakibatkan peningkatan tanggung jawab untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel

(Noviades, 2013). Dengan bertambahnya jumlah pemerintah daerah di Indonesia yang mendapatkan tingkat otonomi yang semakin besar, diperlukan tindakan yang hati-hati untuk mencegah terjadinya penipuan. Penurunan pengendalian internal sering kali menjadi penyebab utama terjadinya penipuan, baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta.

Dengan disetujuinya Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 17 Tahun 2003 (Undang-Undang RI, 2003), Pemerintah Indonesia menginisiasi reformasi menyeluruh dalam pengelolaan keuangan dengan fokus utama pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen keuangan, baik di tingkat pusat atau daerah. Reformasi ini mencakup sejumlah bidang, seperti aturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Peraturan Pemerintah, 2010). Tujuan utama prinsip-prinsip SAP adalah memastikan keandalan, relevansi, dan keterbacaan laporan keuangan pemerintah, sementara reformasi secara menyeluruh bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana publik dan memperkuat pengawasan keuangan (Manossoh, 2015).

Untuk memastikan kredibilitas suatu laporan, diperlukan integritas penulis yang bersikap terbuka, jujur, dan tidak memihak. Tanggung jawab pemerintah desa sebagai pengelola dana desa adalah memastikan bahwa warga memiliki akses terhadap informasi keuangan yang dapat dipercaya, terkini, relevan, dan konsisten (Kartini, 2023). Kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah akan semakin kuat ketika pemerintah desa menjunjung tinggi akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan dana daerah.

Akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan diperlukan untuk mewujudkan tata kelola yang sukses. Untuk menilai tingkat akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jambi, penelitian ini akan melihat penyajian laporan keuangan daerah, ketersediaan informasi, dan pengendalian internal. Dalam konteks ini, analisis akan dilakukan untuk menilai sejauh mana efektivitas penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan APBD di kota Jambi serta menganalisis sistem pengendalian internal apa yang di gunakan dalam pengelolaan APBD di kota Jambi.

Penelitian ini tidak hanya menganalisis efektivitas penerapan pengendalian internal dalam pengelolaan APBD di Kota Jambi, tetapi juga mengidentifikasi sistem pengendalian internal yang digunakan oleh pemerintah Kota Jambi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh dan berguna dalam meningkatkan pengendalian internal dan tata kelola keuangan Kota Jambi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengendalian Internal

Pengendalian internal menjadi 2 kategori yaitu akuntansi dan administratif. Pengendalian internal administratif berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap aturan manajemen, sedangkan pengendalian internal akuntansi difokuskan pada pengamanan aset organisasi dan memverifikasi keandalan dan kebenaran data akuntansi (Nur et al., 2023). Sistem Informasi Akuntansi, menurut (Eni Endaryati et al., 2021), berperan dalam mengelola formulasi, notasi, dan laporan untuk menyediakan data keuangan yang diperlukan guna pengambilan keputusan. (Gusherinsya & Samukri, 2020) menambahkan bahwa sistem informasi akuntansi melibatkan kelompok komponen fisik dan non-fisik untuk mengelola data kinerja terkait informasi keuangan.

Penggunaan sistem, protokol dan instruksi, data organisasi, perangkat lunak, dan infrastruktur informasi adalah 6 elemen sistem informasi akuntansi yang dijelaskan (Putri & Endiana, 2020). Tujuan pemerintah dapat dicapai dengan lebih baik, efektif, serta efisien dengan bantuan pengendalian internal sebagai mekanisme dalam operasional pemerintah (Sari et al., 2020). Menurut (Burhani et al., 2022), perusahaan dapat mengelola operasi operasional mereka dengan lebih efektif dan mencegah penipuan ketika sistem pengendalian internal efektif.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Peraturan Pemerintah, 2008) merupakan landasan penting dalam pemerintahan, guna menjamin efektivitas dan efisiensi melalui efisiensi operasional, pelaporan keuangan yang akurat, dan perlindungan aset (Widyatama et al., 2017). Penerapan SPIP bertujuan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan pemerintah, menghindari pemborosan anggaran (Puspa & Prasetyo, 2020). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari lima bagian. Kepala departemen memiliki peran penting dalam mengembangkan dan mempertahankan sistem pemantauan yang memfasilitasi penggunaan SPIP di tempat kerja (Puspa & Prasetyo, 2020).

Tujuan pengendalian internal adalah untuk memeriksa ancaman eksternal dan internal, dengan analisis risiko sebagai langkah mengidentifikasi dan menilai risiko. Langkah-langkah kontrol diperlukan untuk memastikan instruksi pemimpin diikuti, dan operasi pengendalian yang efisien dan efektif membutuhkan pertimbangan ukuran, kompleksitas, dan sifat tanggung jawab lembaga pemerintah. Sistem informasi akuntansi memiliki peran penting dalam

mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan (N. L. W. T. Lestari & Dewi, 2020).

Sistem Akuntansi Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan pendapatan dan belanja dalam 1 tahun anggaran yang berlangsung dari tanggal 1 Januari - 31 Desember. Tujuan utama dari penyusunan APBD ini adalah untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah, dengan harapan dapat meningkatkan otonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat. Seperti juga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD memiliki peran strategis dalam mengendalikan pemborosan, kecurangan, dan kesalahan di dalam penyelenggaraan negara di tingkat daerah (S. T. Lestari & Hutagaol, 2023).

Setiap lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat ataupun daerah, harus memprioritaskan alokasi anggaran dalam APBD, terutama ketika menerapkan strategi efisiensi dan efektivitas alokatif. Hal ini dilakukan untuk mendukung reformasi keuangan pemerintah yang baru-baru ini dilaksanakan. APBD berfungsi sebagai alat untuk memperkirakan pendapatan dan belanja, mendukung pengambilan keputusan, dan menyetujui rencana belanja di masa depan (Ansar et al., 2021).

Selain itu, APBD juga berfungsi sebagai mekanisme penetapan kewenangan bagi kepala daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyediaan layanan masyarakat. APBD dapat diperkuat sebagai alat pengawasan untuk menjamin pengawasan yang lebih efisien oleh otoritas terkait. Tugas kewenangan, perencanaan, pengawasan, pengalokasian, pembagian, dan pemantapan semuanya dimasukkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Permendagri, 2006). Oleh karena itu, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan kehati-hatian, pertimbangan terhadap efektivitas anggaran dan keselarasan dengan tujuan pembangunan daerah sangatlah penting (Asse et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, dengan tujuan mempelajari dan menggambarkan peristiwa terkini baik yang disebabkan oleh manusia maupun alam. Lebih lanjut, penelitian deskriptif hanya melaporkan keadaan sebagaimana adanya, tanpa memodifikasi, atau mengubah variabel-variabel yang diteliti (Sugiyono, 2019). Hal ini yang membantu peneliti untuk melakukan analisis apakah pelaksanaan efektivitas sudah berjalan dengan baik dalam pengendalian internal dalam pengelolaan APBD di kota

Jambi. Data primer dan sekunder digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini. Perolehan data primer diperlukan untuk memantau efektivitas pelaksanaan pengendalian internal dalam pengawasan APBD di Kota Jambi, sedangkan data sekunder berupa informasi yang sudah ada mengenai APBD.

Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan beberapa metode pengumpulan data yang digunakan. Observasi dilaksanakan di keadaan umum, fisik, dan operasional BPKAD Kota Jambi. Wawancara berstruktur dilakukan dengan pihak terkait seperti Kepala Badan, Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Belanja, Kasubbid Keuangan, Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dan Kasubbid Anggaran Pendapatan. Adapun teknik dokumentasi digunakan untuk meneliti dan menguji dokumen kegiatan serta struktur organisasi BPKAD Kota Jambi. Semua metode ini diarahkan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait efektivitas pengendalian internal dalam pengelolaan APBD di Kota Jambi, dengan harapan bahwa penelitian ini akan secara signifikan memajukan pengetahuan dan kemajuan dalam prosedur pengendalian internal regional

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Tujuan dari organisasi masyarakat BPKAD Kota Jambi adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengatur sebagian kewenangan pemerintah dan mendekonsentrasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Selatan mempunyai peranan strategis yang sangat penting dalam hal ini, yaitu “Sebagai pengelola utama Pendapatan Asli Daerah terbesar” yang digunakan untuk mendanai belanja di Provinsi Sulawesi Selatan menurut dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas. Tugas pokok BPKAD Kota Jambi sehubungan dengan peranan strategis tersebut adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan daerah yang berkaitan dengan perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi, dan pendapatan daerah lainnya. Selain pengelolaan dan pengarahannya, hal ini juga mencakup koordinasi penyusunan perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya.

Mengenai pengendalian internal di dalam perusahaan, seperti yang disebutkan oleh (Moeller, 2007). Diterapkan melalui operasional yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan semuanya disesuaikan dengan struktur organisasi serta pengendalian internal ditunjukkan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran sebagai penerapan lima elemen

yang saling memperkuat. Unsur-unsur pengendalian internal meliputi penilaian risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, pemantauan pengendalian internal, dan lingkungan pengendalian, sebagaimana tercantum dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Peraturan Pemerintah, 2008). Peneliti juga berupaya untuk memperjelas bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang tercermin di BPKAD Kota Jambi.

Kantor BPKAD Jambi terletak di Jl. Jenderal Basuki Rahmat, Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Jambi adalah lokasi peneliti melaksanakan observasi dan wawancara. Untuk memperjelas dan memperkuat penelitian ini penulis juga mewawancarai beberapa pegawai BPKAD kota Jambi dengan mendokumentasikan hasil wawancara tersebut sebagai alat bukti bahwa penulis sudah melakukan penelitian ini. Pembahasan pada bab ini, penulis hanya membatasi dalam SIP (sistem pengendalian internal) yang di gunakan oleh BPKAD kota Jambi dalam penyusunan APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) kota Jambi, Adapun sebagai berikut:

Wawancara berikut ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala BPKAD kota jambi untuk mengetahui sistem informasi dengan pertanyaan sebagai berikut:

Apa sistem informasi keuangan daerah yang digunakan di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kota Jambi ini?

“Sistem informasi keuangan yang digunakan pada BPKAD ini sendiri terdapat dua sistem keuangan. Untuk penganggaran kita menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dari kemendagri, Sedangkan untuk penatausahaan pertanggung jawaban kita memakai SIPKD dari kemendagri juga. Jadi kami menggunakan dua aplikasi tersebut”

Sistem informasi keuangan yang di gunakan oleh BPKD kota jambi itu sendiri terdiri dari dua sistem keuangan yaitu SIPD dan SIPKD yang masing-masing telah sesuai dengan kemendagri (kementrian dalam negeri). Data dan informasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah merupakan landasan dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 274.

Untuk menilai seberapa baik suatu sistem pengendalian internal diterapkan, sistem tersebut harus dapat menjadi tolok ukur dan acuan manajemen untuk pengujian. Biaya dan keuntungan, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran kinerja, kemajuan teknologi informasi, dan implementasi yang lengkap merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan ketika mengembangkan sistem pengendalian internal. Buatlah dokumen Standar Operasional

Prosedur untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sesuai SOP yang ditetapkan Kemendagri, Dinas BPKAD Kota Jambi sudah beroperasi pada saat penelitian dilakukan.

Sejak kapan sistem tersebut digunakan?

“Sistem yang kita gunakan ada dua ,nah kalau SIPKD itu kita mulai menerapkan sejak tahun 2016 sedangkan SIPD sejak 2020”

Peluncuran SIPD Kemendagri tersebut menjadi landasan kutipan dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 (Permendagri, 2019a). Untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang lebih cepat, inventif, dan kreatif, SIPD dikembangkan. Selain itu, akan memudahkan dalam melakukan proses tahap perencanaan dan pembuatan makalah anggaran dengan input yang telah terintegrasi dengan sistem di seluruh wilayah. Untuk membantu keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, SIPD merupakan sistem pengelolaan informasi yang mengintegrasikan data keuangan daerah, data pembangunan, dan fitur pemerintahan daerah. Proses koordinasi perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah merujuk pada ketentuan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Sebagai respons terhadap hal ini, telah dikembangkan aplikasi berbasis web yang dikenal sebagai SIPD.

SIPD merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, menata, dan mentransformasikan data pembangunan daerah menjadi informasi yang dapat diakses publik. Selain itu, fungsi utama SIPD adalah menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kinerjanya. Setelah keluarnya Permendagri Nomor 70 dan 90 Tahun 2019 yang mewajibkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis teknologi sebagai persyaratan, maka pemasangan SIPD menjadi wajib bagi seluruh daerah di Indonesia (Permendagri, 2019a, 2019b).

BPKAD Kota Jambi adalah salah satu contoh yang telah mengimplementasikan SIPD sejak tahun 2020, sejalan dengan ketentuan Permendagri No 70 Tahun 2019. Keberhasilan penerapan SIPD di BPKAD Kota Jambi mencerminkan komitmen dalam menerapkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan informasi pembangunan daerah. Selain SIPD, BPKAD Kota Jambi juga telah menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sejak tahun 2016. Proses pembuatan dan pelaksanaan anggaran serta pelaporan keuangan daerah didukung oleh SIPKD. Penerapan SIPKD sejak beberapa tahun lalu menunjukkan langkah progresif dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Apakah sistem keuangan daerah yang digunakan di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kota Jambi telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku?

“Sudah, kami sudah merapkan sistem keuangan yang kami gunakan di BPKAD Kota Jambi ini untuk mengelola data keuangan Kota Jambi ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”

Apakah laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi?

“Untuk penganggaran dan penatausahaan itu tidak terintegrasi secara langsung, tetapi pemindahan data dilakukan lewat migrasi data”

Kumpulan prosedur yang menghubungkan banyak sistem komputer dan perangkat lunak aplikasi baik secara fisik maupun fungsional dikenal sebagai sistem terintegrasi. Komponen-komponen subsistem digabungkan menjadi suatu sistem yang terintegrasi, yang menjamin bahwa subsistem-subsistem tersebut bekerja sebagai satu kesatuan. Salah satu gagasan utama sistem informasi manajemen adalah integrasi sistem informasi. Berbagai metode tersedia bagi sistem bersama untuk terhubung ke jaringan bersama sesuai kebutuhan. Aliran informasi sistem ke sistem paling bermanfaat ketika masukan dari satu sistem menjadi keluaran dari sistem lain atau ketika data dari satu sistem file juga dibutuhkan oleh sistem file lain. Beberapa hal juga dapat diintegrasikan secara manual. Misalnya, data digabungkan oleh juru tulis dengan data dari sistem lain dan ditransfer dari satu wilayah ke wilayah lain. Hasilnya, integrasi manual memiliki tingkat integrasi yang lebih besar. Sistem yang dapat dihubungkan dengan berbagai cara berdasarkan kebutuhan Anda merupakan dasar dari gagasan integrasi sistem. Ketika informasi dari satu sistem file diperlukan di sistem file lain, atau ketika output suatu sistem berfungsi sebagai input sistem lain, hal ini sangat membantu.

Salah satu keuntungan dari integrasi sistem ini adalah lebih banyak informasi yang mengalir melalui perusahaan. Laporan biasanya memakan waktu lebih lama, tetapi memberikan lebih banyak informasi yang relevan dengan kegiatan administratif bila dibutuhkan. Dengan tujuan sistem informasi untuk menyampaikan informasi yang benar pada waktu yang tepat, manfaat ini merupakan argumen yang kuat untuk memilih (atau mendukung) sistem informasi yang terintegrasi. Administrator diberi insentif untuk bertukar informasi yang dihasilkan oleh departemen atau departemen mereka dan secara konsisten mengalihkannya ke sistem lain yang memerlukannya, yang merupakan manfaat tambahan dari integrasi sistem.

Hal ini menunjukkan bagaimana BPKAD Kota Jambi telah menerapkan SPIP untuk mengelola keuangan daerah di Kota Jambi dan memastikan jadwal kegiatan dan alokasi anggaran yang tersedia berjalan beriringan. Dengan adanya prosedur penerapan penerapan

SIPD dan SIPKD menunjukkan betapa adaptifnya organisasi terhadap perubahan internal maupun eksternal. Berdasarkan teori adaptasi dan temuan penelitian, BPKAD telah mengadopsi adaptasi apa pun yang dimungkinkan oleh SIPD dan SIPKD sesuai dengan Kementerian Dalam Negeri terkait.

SIMPULAN

Penggunaan sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengelolaan APBD di Kota Jambi telah berhasil diselesaikan melalui penggunaan sistem SIPD dan SIPKD, sesuai dengan temuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Sistem tersebut telah memenuhi persyaratan pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan telah memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri yang berlaku.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota disusun menggunakan aplikasi SIPD dan SIPKD terbukti dari efektivitas penerapan dan pemanfaatan sistem yang sudah ada. Proses ini juga mendukung transparansi dalam pelaporan keuangan BPKAD kepada masyarakat dengan cara mempublikasikan informasi ke website BPKAD dalam beberapa periode.

Selain itu, penyusunan laporan keuangan oleh BPKAD dianggap efektif karena sumber data dari berbagai transaksi di berbagai perangkat daerah direkonsiliasi secara berkala, memastikan penyusunan keuangan dilakukan tepat waktu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kota Jambi telah berhasil menjalankan pengendalian internal dan proses penyusunan APBD secara efektif, mematuhi regulasi yang berlaku, dan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan kepada masyarakat. Kesimpulan ini memberikan gambaran positif terkait manajemen keuangan daerah di Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansar, A., Hidayat, M., & Fatmasari. (2021). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Dimoderasi Belanja Modal Di Kabupaten Kepulauan Selayar. *NMaR Nobel Management Review*, 2(2), 59–72.
- Asse, M. R. A., Rahman, N., & Kiitta, S. (2023). Strategi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 4(1), 175–189.
- Bulan, S. G. I., Tinangon, J. J., & Mawikere, L. (2017). Pengaruh Kualitas Pengelola Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Inspektorat Pemerintah Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 263–271. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17214.2017>

- Burhani, F. T., Wafi, F. M., Damayanti, N., Octaviany, V., & ... (2022). Penerapan Internal Control Dalam Mencapai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Pada Pt. Telemedia Dinamika Sarana). *E-Prosiding*
<http://www.trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/EPAKT/article/view/1193>
- Eni Endaryati, Sri Wahyuning, & Meylia Putri Mawardani. (2021). Sistem Informasi Akuntansi Arus Kas Sebagai Pengendali Kas Dengan Metode Accrual Basis. *Jurnal Manajemen Informatika & Teknologi*, 1(1), 43–54.
<https://doi.org/10.51903/mifortekh.v1i1.32>
- Gusherinsya, R., & Samukri, S. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 58–68.
<https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.94>
- Kartini, N. (2023). Pengaruh Sistem Pelaporan Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang Pada Masa Pandemi Covid-19. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 10(2), 197–209.
<https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v10i2.934>
- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170–178.
<https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1435.170-178>
- Lestari, S. T., & Hutagaol, H. D. (2023). Analisis Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 755–772.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2699>
- Manossoh, H. (2015). The Implementation of Governmental Accounting System To Initiate Good Government Governance in North Sulawesi Province. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 786–787.
- Miliani, N. K. S., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 4(1), 97–104.
- Moeller, R. R. (2007). *COSO Enterprise Risk Management: Understanding the New Integrated ERM Framework*. John Wiley & Sons.
- Noviades, D. (2013). Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 81–97.
- Nur, M. M., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(1), 48–58.
<https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.01.05>
- Peraturan Pemerintah. (2008). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- Peraturan Pemerintah. (2010). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Permendagri. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri. (2019a). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Permendagri. (2019b). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Putri, P. A. Y., & Endiana, I. D. M. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Koperasi Di Kecamatan Payangan). *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 63. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1433.179-189>
- Sari, R. P., Mulyani, C. S., & Budiarto, D. S. (2020). Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.26486/jramb.v6i1.697>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang RI. (2003). Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 17 Tahun 2003.
- Undang-Undang RI. (2004). Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140>